

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang beralamat di Jl. Raya Robatal dengan potensi yang cukup strategis dan terletak diantara Kota Sampang dan pesisir utara ketapang

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Dimana jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui penelitian dan hanya untuk mendeskripsikan tidak untuk melihat hubungan atau membandingkan (Ulum, 2015). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam yaitu data yang mengandung makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2010).

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.3.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Data primer yang didapat dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara sumber atau informan yang berpotensi memberikan informasi

yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Pemilihan sumber atau informan dalam penelitian ini, berdasarkan atas subjek yang memahami permasalahan dan bersedia memberikan data ataupun informasi lain yang dapat dijadikan jawaban dari penelitian yang diperlukan. Adapun informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

No	Status	keterangan	Jumlah Responden
1	Kepala Desa	Abdul. Hamid	1
2	Ketua RT dan RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dusun Tarogan</li> <li>• Dusun Jelgung</li> <li>• Dusun Bere' sabe</li> <li>• Dusun Burajeh</li> </ul>	12
3	Tokoh Masyarakat	• Bhejingan (orang blatir)	2
4	Ketua PTPKD	Sayyadi	1
5	Sekretaris	Moh. Zaini	1
6	Bendahara	Abd. Kadir Jaelani	1

### 3.3.2 Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data priemer. Data sekunder dapat berupa studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Daftar hadir Musrembangdes
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
3. Peraturan Desa
4. Laporan pertanggungjawaban

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Melakukan wawancara yang mendalam dan terstruktur mengenai indikator akuntabilitas dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan beberapa warga desa.
- b. Melakukan wawancara yang mendalam kepada masyarakat desa untuk mengetahui tingkat transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) yang dilakukan oleh aparat desa. Dalam melakukan wawancara peneliti memilih beberapa masyarakat sebagai sample untuk dijadikan responden, adapun dalam menentukan sample peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria sebagai berikut :
  - a) Masyarakat desa Jelgung
  - b) Mempunyai jabatan sebagai Kepala dusun, ketua RW, ketua RT, dan Tokoh Masyarakat.

Melakukan dokumentasi terhadap beberapa dokumen terkait pengelolaan APBDesa yang berada di kantor desa dan bukti fisik dari pengelolaan yang dilakukan desa seperti pembangunan yang dilakukan desa

### 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam hal menjawab rumusan masalah, maka peneliti melakukan 2(dua) tahap analisis data yaitu menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014.

#### 3.5.1 Langkah-langkah analisis data untuk menilai akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Jelgung :

- a. Melakukan analisis terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa berdasarkan hasil wawancara terhadap perangkat desa, dokumentasi berupa laporan keuangan desa serta bukti fisik pembangunan desa, dan melihat kesesuaian data yang didapat dengan indikator yang telah disesuaikan dengan permendagri 113 tahun 2014 kemudian menilai tingkat akuntabilitas menggunakan rumus indeks indikator (krina 2003) :

$$\text{indeks indikator} = \frac{\text{jumlah indikator yang terpenuhi}}{\text{jumlah indikator ideal}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Indikator Akuntabilitas

NO	PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014	DESA	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan/ kesepakatan desa dan warga, hasil notulen).	Dapat dilihat didaftar hadir peserta Musrembangdes.		
2	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.	Terdapat dalam RKPDesa tahun anggaran.		
3	Bendahara wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara setiap bulan harus tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawab an setiap tanggal 5 bulan berikutnya.		
4	Semua pendapatan ditransfer melalui rekening kas desa (bukti transfer).	Dapat dilihat dengan adanya buku rekening kas desa.		
5	Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	Dapat dilihat dilaporan APBDesa lembar kerja.		
6	Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat	Adanya bukti laporan pertanggungjawab an yang dibuat		

	waktu atau sesuai periode.	oleh pemerintah desa yang dilaporkan kepada pihak kecamatan.
7	Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.	Adanya pengawasan dari pihak inspektorat dan pembinaan dari pemerintah kabupaten.

- b. Menarik kesimpulan dari hasil perhitungan yang dilakukan, didukung dengan data hasil wawancara dengan perangkat desa dan beberapa warga.

Untuk mengetahui apakah indeks indikator dapat dikatakan akuntabel atau tidak dalam pengelolaan APBDesa, maka peneliti menggunakan pengukuran menurut Widyastuti (2005) sebagai berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Tingkat Akuntabilitas

Indeks Indikator (%)	Kriteria Akuntabilitas
0-25	Sangat kurang akuntabel
26-50	Kurang akuntabel
51-75	Cukup akuntabel
75-100	Akuntabel

### 3.5.2 Langkah-langkah analisis data untuk menilai transparansi pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Jelgung :

- a. Melakukan analisis terhadap tingkat transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa berdasarkan hasil wawancara terhadap perangkat desa dan beberapa warga, dokumentasi berupa laporan keuangan yang di informasikan baik melalui Mading Desa, maupun media masa yang bisa di akses masyarakat, serta bukti fisik pembangunan desa, dan melihat kesesuaian data yang didapat dengan indikator yang telah disesuaikan dengan permendagri 113 tahun 2014 kemudian menilai tingkat akuntabilitas menggunakan rumus indeks indikator (krina, 2003) :

$$\text{indeks indikator} = \frac{\text{jumlah indikator yang terpenuhi}}{\text{jumlah indikator ideal}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Indikator Transparansi

NO	PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014	KETERANGAN	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis	Dapat dilihat didaftar hadir peserta Musrembangdes.		

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 2 | Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat | Dapat dilihat di papan pengumuman Desa atau media informasi lainnya berupa musyawarah                            |
| 3 | Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat  | Adanya bukti laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa yang dilaporkan kepada pihak kecamatan. |
| 4 | Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.                                   | Dapat dilihat dengan adanya buku rekening kas desa.  |
- 

- b. Menarik kesimpulan dari hasil perhitungan yang dilakukan yang didukung dengan data hasil wawancara dengan perangkat desa dan beberapa warga.

Untuk mengetahui apakah indeks indikator dapat dikatakan transparan atau tidak dalam pengelolaan APBDesa, maka peneliti menggunakan pengukuran menurut Widyastuti (2005) sebagai berikut:



Tabel 3.4 Klasifikasi Tingkat Transparansi

Indeks Indikator (%)	Kriteria Transparansi
0-25	Sangat kurang transparan
26-50	Kurang transparan
51-75	Cukup transparan
75-100	Transparan

